



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**  
**P-ISSN : 2621-0312**  
**E-ISSN : 2657-1560**  
**Vol. 6, No. 1 Tahun 2023**  
**DOI : [10.21043/politea.v6i1.19952](https://doi.org/10.21043/politea.v6i1.19952)**

---

## **Analisis Strategi Kontra Terorisme Swedia Dalam Menghadapi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)**

Moza Jeanne Siregar  
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia  
mozajeanne03@webmail.com

Haryo Prasodjo  
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia  
haryoprasodjo@umm.ac.id

Devita Prinanda  
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia  
devitaprinanda@umm.ac.id

### ***Abstract***

*This article discusses an analysis of the Swedish Counterterrorism Strategy in dealing with ISIS. Sweden has become one of the countries in the European region that has an open policy for refugees. However, Sweden's opening up to asylum seekers has had a number of negative impacts. Therefore in 2015, Sweden issued a new policy to limit arriving refugees or immigrants. This is also based on the increasing threat of terrorism. The terrorism that Sweden faces is on a large scale that threatens the country's stability and security. Using the concept of Counter-Terrorism, this paper tries to explain that Counter-Terrorism efforts are a precaution to combat Terrorism. Departing from this, this study seeks to analyze Sweden's Counter-terrorism Strategy in dealing with ISIS. Through this type of research that is descriptive in nature with the use of literature studies as a data collection technique, this study found that Swedish Counter-Terrorism received a lot of criticism and was considered weak by researchers and experts. However, researchers found that there are five strategies from Sweden's Counter Terrorism that can help fight terrorism, which include law enforcement, deradicalization, use of intelligence, strengthening terrorism institutions, and conducting international and regional cooperation.*

*Keywords: Counter Terrorism, ISIS, Refugees, Sweden*

## **Abstrak**

Artikel ini membahas terkait analisis terhadap Strategi Kontra terorisme Swedia dalam menghadapi ISIS. Swedia telah menjadi salah satu negara di wilayah eropa yang memiliki kebijakan terbuka bagi pengungsi. Namun dengan terbukanya Swedia terhadap pencari suaka telah memberikan berbagai dampak yang buruk. Sehingga pada tahun 2015, Swedia telah mengeluarkan kebijakan baru untuk membatasi para pengungsi atau imigran yang berdatangan. Hal tersebut juga didasari oleh adanya ancaman terorisme yang semakin bertambah. Terorisme yang dihadapi Swedia berada di skala yang besar hingga mengancam stabilitas keamanan negara tersebut. Menggunakan konsep Kontra Terorisme tulisan ini berusaha menjelaskan bahwa upaya Kontra Terorisme sebagai pencegahan untuk memerangi Terorisme. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis Strategi Kontra terorisme Swedia dalam menghadapi ISIS. Melalui jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan penggunaan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini menemukan bahwa Kontra Terorisme Swedia mendapat banyak kritikan dan dianggap lemah oleh penstudi dan para ahli. Meski demikian, peneliti menemukan ada lima strategi dari Kontra Terorisme Swedia yang dapat membantu memerangi terorisme, yakni meliputi penegakkan hukum, deradikalisasi, penggunaan intelijen, memperkuat lembaga-lembaga terorisme, dan melakukan kerjasama internasional maupun regional.

Kata kunci: ISIS, Kontra Terorisme, Swedia, Pengungsi

## **Pendahuluan**

*Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menjadi perhatian masyarakat global karena eksistensinya yang menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui berbagai tindakan radikal yang dilakukannya. Tujuan ISIS sendiri adalah mendirikan Negara Islam di Irak dan Suriah. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam.

Propaganda ISIS dilakukan melalui berbagai macam instrumen dari media sosial. Kebanyakan melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan lagi gerakan lokal di Irak dan Suriah, tetapi telah menjadi gerakan transnasional. Usaha ISIS untuk menjadi gerakan transnasional ini tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi via internet. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi telah menjadi alat utama ISIS dalam mengembangkan gerakannya.

Awal mula perkembangan ISIS yang masuk ke Swedia ini dikarenakan Swedia menjadi salah satu negara yang ramah terhadap pengungsi dari berbagai negara. Perhatian terhadap integrasi sosial secara historis digabungkan dengan pendekatan yang ramah terhadap pengungsi. Selama perang Dunia II, Swedia telah menerima orang-orang Yahudi dari Denmark dan pengungsi-pengungsi lainnya yang melarikan diri dari rezim Nazi. Alhasil dalam beberapa dekade ini Swedia telah mengadopsi kebijakan pintu terbuka terhadap pencari suaka dari seluruh dunia dan memberikan mereka kesejahteraan sosial yang sama dengan hak warga negara Swedia. Sikap ini telah menjadi bagian dari budaya Swedia dan hasil dari “komitmen moral” untuk menyediakan perlindungan terhadap terjadinya perang (Ravndal, 2018).

Dalam penelitiannya, Gustafsson & Ranstorp (2017) mencatat bahwa adanya penyerangan di Stockholm pada tanggal 7 April 2017. Serangan yang dilakukan merupakan salah satu dari sekian banyak serangan teroris yang telah melanda Eropa dalam beberapa tahun terakhir ini. ISIS telah menargetkan negara-negara Eropa untuk dijadikan sasaran kekerasan yang mereka lakukan. Pada tahun 2014, terjadi serangan teroris di Brussel dan diikuti juga pada tahun selanjutnya di Paris. Sebagian dari serangan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari Suriah dimana tempat mereka dilatih untuk melakukan kekerasan (Gustafsson & Ranstorp, 2017). Selain menjadi salah satu negara yang ramah terhadap pengungsi dari berbagai negara terutama negara berkonflik, Gustafsson & Ranstorp (2017) juga menjelaskan bahwa masuknya pengaruh radikalisme yang dibawa oleh ISIS ini juga terbilang mudah karena berawal dari tahun 1970 dimana sejumlah warga Swedia telah terlibat dalam memberikan dukungan logistik dan keuangan atau bergabung dengan berbagai kelompok militan Islam transnasional yang berbasis di luar negeri. Diantaranya seperti Hizbullah, Hamas, GIA, Al-Qaeda, Negara Islam, Al-Shabaab, Ansar Al-Sunna dan Ansar Al-Islam (Gustafsson & Ranstorp, 2017).

Mayoritas jihadis Swedia berasal dari lingkungan yang dirampas, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya penyebab dari radikalisasi. Namun tidak semua berasal dari lingkungan yang buruk. Adapun Aydin Sevigin yang berasal dari sebuah daerah makmur di Stockholm yang aksinya gagal dalam melakukan serangan bom pada tahun 2016 (Reuters,

2016). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan buruk tidak selalu menjadi alasan tindakan radikalisme terjadi. Proses radikalisasi inipun meliputi beberapa faktor pendorong dan penariknya. Seperti keluhan terhadap sosial, politik dan ekonomi, rasa ketidakadilan dan diskriminasi, krisis identitas, serta pengasingan sosial inilah yang menjadi faktor pendorong utama. Sedangkan faktor penariknya meliputi rasa ingin memiliki terhadap sesuatu, pengaruh ideologi dan jaringan sosial, serta penebusan pribadi (Norell, 2005).

Swedia juga telah melihat banyak warga negaranya yang pergi berperang untuk ISIS. Bergabungnya warga negara swedia dalam organisasi teroris ini bukanlah fenomena yang baru, sekitar 30 warga negara Somalia-Swedia bergabung dengan Al-Shabaab diantara tahun 2006 dan 2009 (Gustafsson & Ranstorp, 2017). Menurut statistik terbaru pada tahun 2010, ada 311 orang yang telah pergi ke Irak dan Suriah dan dari sepertiga telah kembali, dan sepertiganya telah tewas dan sepertiganya lagi masih berada di zona konflik atau tempat lain (Cook & Vale, 2018). Secara khusus, proses radikalisasi ini tersebar dengan jaringan kekeluargaan dan pertemanan, banyak dari mereka memiliki keluhan yang sama sehingga proses radikalisasi ini cepat terjadi. Radikalisasi secara daring juga menjadi tantangan yang serius, hal ini berhubungan dengan kepiawaian anggota ISIS dalam memanfaatkan peran penting teknologi informasi seperti sosial media. Beberapa yayasan keagamaan seperti masjid dan sekolah juga berperan penting dalam terlaksananya radikalisasi, karena tempat-tempat tersebut dijadikan lahan untuk pertemuan antara individu dengan pelaku utama radikal.

Pada tahun 2017, Badan keamanan dan Intelijen Swedia, Säkerhetspolisen (SÄPO) memantau sekitar 2000 individu yang teridentifikasi sebagai ancaman keamanan nasional, sementara ribuan lainnya dianggap bersimpati dengan ideologi ekstremis Islam (Radio Sweden, 2017). Pada bulan desember 2010, Taimour Abdulwahab al-Abdaly seorang warga negara swedia kelahiran irak ini melakukan ledakan bom mobil dan sabuk bunuh diri di Stockholm (VOA, 2010). Diikuti lagi pada tahun 2017, warga Uzbekistan bernama Rakhmat Akilov yang telah ditolak suaknya oleh pemerintahan Swedia melakukan tindakan ekstrim dengan menabrak pejalan kaki di ibu Kota dengan sebuah truk yang menewaskan lima orang (BBC, 2018).

Terjadinya kejahatan teror yang terus menerus membuat Swedia menjadi negara yang tidak aman terhadap ancaman yang terus berdatangan. Hal inilah yang membuat Swedia mengeluarkan Strategi Kontra-Terrorisme dalam menghadapi ISIS. Hal ini menarik untuk dibahas karena Swedia sendiri merupakan negara yang terbuka terhadap pencari suaka dari negara yang berkonflik seperti Irak dan Suriah, namun Swedia tetap tidak bisa mengontrol adanya paham-paham radikalisme yang dibawa oleh para pengungsi dari negara perang yang mana mudah untuk di warga negaranya sendiri. Dengan demikian, melihat adanya ancaman ISIS di Swedia yang terjadi secara beruntun maka penelitian ini berfokus pada Strategi Kontra Terorisme Swedia dalam Menghadapi ISIS dengan menggunakan batas waktu dari tahun 2010 hingga 2017. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian “Bagaimana Strategi Kontra Terorisme Swedia dalam menghadapi *Islamic State of Iraq and Syria*?”. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan dari konsep Kontra Terorisme.

Artikel ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada mengenai kualitas objek perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara objek. Penelitian kualitatif juga akan mendeskripsikan lima upaya dari strategi Kontra Terorisme yang digunakan oleh pemerintahan Swedia dalam menghadapi ISIS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan menelaah dokumen dan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, laporan dan berita. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa kumpulan data berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data mentah yang kemudian akan diolah ke dalam bentuk yang sesuai kebutuhan dalam penelitian ini agar tidak perlu memasukkan data yang tidak dibutuhkan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Konsep Kontra Terorisme*

Pada dasarnya Kontra Terorisme merupakan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler (2005) mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti-teror yaitu proaktif dan defensif. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kontra Terorisme ini adalah dengan dilakukannya *deradicalization* dan *disengagement*. Menurut mentan, Kontra Terorisme adalah sebuah intervensi yang dilakukan yang mana dalam hal ini merupakan upaya pemerintahan untuk menangani tindakan terorisme (Sandler, 2005). Kontra Terorisme juga merupakan tindakan dari seluruh kebijakan pemerintah baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri yang dirancang untuk mengekang teroris dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan teroris, memulihkan dan menegakkan ketertiban sosial dalam masyarakat (Omelicheva, 2013).

Kontra Terorisme lebih menekankan pada upaya yang dilakukan pemerintah ketika telah terjadi serangan terorisme. Namun pada dasarnya dalam Kontra Terorisme ada pula upaya *defensive* dan *offensive* seperti yang telah dijelaskan diatas. Maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara keduanya karena karakteristik utama dalam anti terorisme telah ada pada kontra terorisme. Kemunculan terorisme memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada strategi dalam kontra terorisme yang tidak memiliki satu ukuran pasti di dalam pengetahuan. Beberapa ahli terorisme memiliki model tersendiri mengenai tindakan Kontra Terorisme bahkan setiap negara yang sedang menghadapi ancaman terorisme memiliki kebijakan Kontra Terorisme yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan dapat dilihat dari tujuan, target dari teroris, dan keuntungan yang didapat (Yanuarti, 2014). Kebijakan Kontra Terorisme ini dapat meliputi peningkatan atau modernisasi teknologi pencegah terjadinya kejahatan, penguatan terhadap target atau upaya memperkuat masyarakat agar tidak menjadi bagian dari teroris, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme dan memberikan atau memperbarui hukum agar sanksi yang didapatkan teroris lebih berat dan memberikan efek jera terhadap pelaku teroris tersebut (Sandler, 2005).

Upaya dari Kontra Terorisme tidak hanya memiliki satu patokan khusus akan tetapi tergantung pada ancaman teroris yang dihadapi suatu negara. Sehingga dalam hal ini Kontra

Teroris dapat berupa penegakan hukum, deradikalisasi, penggunaan intelijen, peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme, melakukan serangan militer terhadap teroris, melakukan operasi gabungan dengan negara lain, kerjasama regional maupun kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Upaya-upaya tersebut kemudian terimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara. Strategi Kontra Terorisme yang dilakukan oleh Swedia sendiri bertujuan untuk menciptakan struktur yang jelas untuk memerangi kejahatan teroris. Strategi tersebut menekankan pentingnya kerjasama dan tindak lanjut yang jelas sehingga dapat mencegah terjadinya terorisme (Sandler, 2005).

### *Peran Pemerintah Swedia dalam Memperkuat Strategi Kontra Terorisme*

Swedia merupakan salah satu negara yang mengaku bahwa mereka merupakan negara yang terbuka, bebas dan bahkan menganggap negaranya merupakan salah satu negara yang sangat demokratis dan terbuka terhadap pencari suaka. Hadirnya Islam di Swedia telah muncul pada awal tahun 1970-an ditandai dengan ada banyaknya imigran yang berdatangan dari timur tengah. Sehingga sebagian besar dari penduduk muslim yang ada di Swedia sendiri dikuasai oleh para imigran yang berdatangan tersebut dan juga keturunan dari para imigran tersebut, kebanyakan dari para imigran yang berasal dari Timur Tengah itu merupakan Irak dan Iran (Charles Westin, 2006).

Menjadi negara yang terbuka terhadap pencari suaka tentu bukan hal yang mudah untuk diterima oleh para kalangan masyarakat bahkan kalangan politikus sekalipun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peran massif yang dilakukan oleh partai demokrat Swedia atau *Sweden Democrat party*. Partai SDP merupakan partai yang menentang kebijakan Swedia terhadap imigran yang dianggap terlalu murah hati untuk memberikan tempat tinggal bagi pencari suaka di Swedia sendiri. Partai SDP menganggap bahwa kedatangan para imigran hanya akan menyebabkan ketegangan social dan dampak ekonomi di dalam negeri. Sehingga para imigran juga dipercaya dapat membawa ancaman terhadap identitas nasional, kesejahteraan dan keamanan negara (Backlund, 2011).

Untuk melakukan suatu kegiatan yang mengukur kapasitas negara dan aktor lain agar melawan tindakan kejahatan dalam bentuk terorisme merupakan tugas yang sangat penting

dan mendesak. Oleh karenanya Kontra Terorisme dapat digambarkan sebagai bidang kebijakan yang kompleks, terus berubah, dan berganti. Terorisme merupakan isu yang sensitif jika dilihat dari kaca mata politik beserta lika liku dari politik itu sendiri. Strategi Kontra Terorisme nasional Swedia yang telah diterbitkan pada tahun 2011 dengan berani menyatakan bahwa kemampuan swedia dalam menghadapi ancaman terorisme telah berkembang dengan baik (Sweden, 2011). Pernyataan terkait kebijakan tersebut didukung oleh lembaga-lembaga pemerintahan Swedia. Säkerhetspolisen atau biasa disingkat sebagai SÄPO adalah Badan Intelijen dan Keamanan Militer Swedia yang merupakan badan nasional besar dalam memerangi dan mendeteksi terorisme di Swedia. Pada tahun 2010, SÄPO menyatakan bahwa tingkat ancaman teroris terus meningkat sejak tahun tersebut, hal tersebut terjadi karena SAPO sendiri belum sepenuhnya siap dalam menghadapi bentuk kekerasan terorisme tersebut (Strandh & Eklund, 2015).

Dalam penelitian Strandh & Eklund (2015) menjelaskan bahwa ada dua aspek yang telah dijabarkan dalam mengamati pencegahan terorisme yang dilakukan Swedia. Yang pertama adalah mereka berpendapat bahwa pemerintah Swedia di era modern ini hanya memiliki pengalaman yang terbatas terkait menangani serangan teroris yang sebenarnya. Yang mana pengetahuan praktis yang dimiliki oleh pemerintah Swedia dalam mencegah dan mengurangi aksi terorisme di Swedia tidak memiliki kejelasan yang pasti. Kemudian yang kedua peneliti tersebut menganggap bahwa elemen resmi publik dan kebijakan Kontra Terorisme kontemporer telah dikaitkan dengan proses legitimasi di dalam komunikasi massa. Sehingga hal tersebut sangat masuk akal untuk diasumsikan bahwa strategi kontra terorisme Swedia hanya ditujukan pada jaminan publik. Upaya pemerintah Swedia dalam menerapkan strategi Kontra Terorisme dengan melakukan kolaborasi semua aktor politik serta kelompok masyarakat (Strandh & Eklund, 2015).

Setiap negara di wilayah Eropa tentu memiliki caranya tersendiri dalam menangani para peserta ISIS yang telah kembali. Hal tersebut telah menjadi hal kompleks yang dihadapi bagi negara di wilayah Eropa. Swedia telah banyak dikritik oleh partai-partai di parlemen nya sendiri maupun dari para ahli karena swedia dinilai tidak bertindak sesuai dalam menerapkan strategi yang cukup tangguh untuk melawan terorisme. Diantara para kritikus,



salah satu yang juga mengkritisi strategi Kontra Terorisme Swedia adalah Ranstorp (2019) yang merupakan seorang pakar terorisme di Swedia (Ranstorp, 2019). Ranstorp (2019) mencontohkan bagaimana strategi Kontra Terorisme Denmark dalam melakukan kolaborasinya antar otoritas sosial dengan polisi, yang mana itu merupakan langkah baik yang diambil Denmark dalam mencegah adanya terorisme (Ranstorp, 2019). Ranstorp (2019) menganggap bahwa tindakan yang diambil oleh Denmark merupakan aspek utama yang telah membantu memerangi terorisme (Ranstorp, 2019).

Ranstorp (2019) juga menunjukkan fakta bahwa Denmark telah melegalkan pencabutan kewarganegaraan bagi mereka yang berkewarganegaraan ganda, yang telah melakukan kejahatan serius. Suara kritis lainnya adalah Herlin-Karnell, yang menunjukkan fakta bahwa Swedia belum menerapkan arahan yang diberikan oleh UE terkait partisipasi dengan kelompok teroris, dan bahkan Swedia terbilang terlambat dalam mengkriminalkan perjalanan Teroris. Hal ini tentu akan mempersulit Swedia untuk mengadili mereka yang melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS. Kritikan yang diterima oleh Swedia pada strategi Kontraterorisemenya ini terjadi karena dibandingkan dengan negara eropa lainnya, hanya Swedia yang belum menerapkan sistem undang-undang atau peraturan yang ketat mengenai pejuang asing yang telah kembali ke negara asalnya (Ranstorp, 2019).

Meskipun strategi kontra terorisme Swedia dianggap lemah dan mendapat banyak kritik. Namun untuk melakukan sebuah pencegahan, Swedia sendiri telah menerapkan atau melaksanakan beberapa langkah yang dapat membantu strategi Kontra Terorisme ini agar dapat berjalan dengan semestinya. Dalam mewujudkan hal tersebut, melalui strategi Kontra Terorisme peneliti mengambil lima langkah upaya yang telah dilakukan Swedia dalam memperkuat Strategi Kontra Terorisme. Alasan mengapa peneliti menganalisis lima upaya Kontra Terorisme yang dilakukan Swedia, karena pada dasarnya konsep Kontra Terorisme yang dikemukakan oleh Sandler (2005) menjelaskan bahwa upaya dari Kontra Terorisme itu tidak hanya memiliki satu patokan khusus, melainkan tergantung pada ancaman terorisme yang dihadapi pada suatu negara (Sandler, 2005). Swedia telah menghadapi berbagai serangan teroris dari ISIS. Sehingga dalam menanggapi masalah tersebut, peneliti

menemukan bahwasanya ada lima upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Swedia dalam melawan terorisme, lima strategi tersebut meliputi ;

*a. Penegakkan Hukum melalui Countering Violent Extremism (CVE)*

Dalam melawan Ekstremisme kekerasan, Swedia bersama dengan Pusat Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (CVE) telah melakukan berbagai rangkaian berlandaskan dengan kebijakan kejahatan untuk memperkuat dan mengembangkan upaya pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan. Tujuan utama dari pusat pencegahan ini adalah untuk mencegah kriminalitas dan terorisme yang bermotivasi dari sebuah ideologis atau paham yang lahir di Swedia. Pusat ini berada di naungan Brå yang didirikan pada 1 Januari 2018 dan merupakan Dewan nasional pencegahan kejahatan Swedia (CVE, 2022).

Dewan Nasional Swedia dalam pencegahan Kejahatan (Brottsförebyggande rådet or Brå) yang berdiri sejak tahun 1974 dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Mattias Larsson ini merupakan sebuah pusat pengetahuan untuk sistem peradilan pidana. Brå adalah lembaga yang berada di bawah naungan kementerian kehakiman dan pusat pengetahuan dalam sistem peradilan pidana. Tugas badan tersebut ialah untuk berkontribusi dalam pengembangan dan pengetahuan pada sistem peradilan pidana dan bidang kebijakan kriminal serta untuk mempromosikan pekerjaan pencegahan kejahatan. Brå juga bertanggung jawab atas statistik kriminal resmi dan statistik lainnya yang meliputi produksi, menganalisis dan melaporkan kriminalitas dan respon terhadap sistem peradilan pidana terhadap kejahatan. Oleh karena itu, Brå jugalah yang akan menghasilkan statistik yang didasari oleh survey skala besar dan pengumpulan data khusus lainnya (Brå, 2023).

Tugas yang dilakukan oleh Brå juga termasuk mengembangkan pekerjaan pencegahan kejahatan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Kebutuhan akan kualitas tinggi tentu memerlukan hubungan dekat dengan suatu instansi dari lembaga pendidikan tingkat tinggi (Brå, 2023). Kewajiban untuk menanggapi suatu sistem peradilan pidana tersebut juga membutuhkan suatu pengembangan metodologi dan pengembangan pengetahuan agar dapat terciptanya kerjasama yang erat dan saling percaya. Pusat

Pencegahan Ekstremisme Kekerasan memiliki tugas untuk mengembangkan pekerjaan berbasis pengetahuan dan lintas sektor pada tingkat nasional, regional, dan lokal di Swedia. Hal tersebut mencakup antara lain, memberikan dukungan berbasis pelaku lokal, memiliki fungsi sebagai pusat pengetahuan, dan berkontribusi dalam menciptakan efektivitas dan koordinasi yang lebih baik sehubungan dengan langkah-langkah pencegahan.

Adapun empat tugas utama yang dimiliki oleh pusat ini, antara lain ;

- 1) Mempromosikan pengembangan pekerjaan pencegahan di tingkat nasional, regional, dan lokal.
- 2) Bekerja untuk mencapai tingkat koordinasi dan efektivitas yang lebih tinggi sehubungan dengan langkah-langkah pencegahan.
- 3) Memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan kotamadya, lembaga, dan aktor lain yang memiliki tugas mencakup penanganan masalah dan juga yang terlibat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.
- 4) Mengumpulkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didasari oleh penelitian juga pengalaman yang telah terbukti dan mengupayakan praktik berbasis pengetahuan.

Pusat pencegahan ekstrimisme kekerasan atau disingkat CVE ini mencakup beberapa aktor publik dan sipil seperti, layanan dan pekerjaan sosial, sekolah, asosiasi sipil dan keagamaan. Selain itu, polisi keamanan dan sistem peradilan pidana juga menjadi bagian yang wajib dari pekerjaan pencegahan tersebut dengan memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah Kota dan langkah-langkah melawan radikalisme di kalangan masyarakat. Menurut pemerintahan Swedia, Pengadilan dan sistem hukum juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memerangi terorisme (Meridian, 2014).

Sehingga untuk melawan ekstremisme kekerasan ini, Swedia menerapkan sistem *Social Work* sebagai alat untuk melawan ekstremisme kekerasan tersebut. Dalam menerapkan sistem tersebut, Pemerintah Swedia melalui CVE telah memerintahkan polisi dan polisi keamanan untuk memasukkan 'Pengendalian Terorisme' dalam rutinitas sehari-hari. Namun langkah-langkah tersebut sering diterapkan untuk mengendalikan

kaum muda di daerah-daerah terpinggirkan yang dianggap sebagai masalah keamanan negara. Sekuritisasi masyarakat secara umum dan meningkatnya kontrol terhadap pemuda berlatar belakang imigran telah mengubah kebijakan integrasi tradisional Swedia menjadi kebijakan pengawasan dan tindakan pengamanan (Finch, Jönsson, Kamali, & McKendrick, 2022).

*b. Penggunaan Badan Intelijen Säkerhetspolisen (SÄPO)*

Swedia telah mendirikan Dinas keamanannya pada tahun 1989, badan ini didirikan sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan politik dan militer di wilayah Eropa serta tanggapan atas kebangkitan Nazi Jerman. Badan keamanan intelijen ini terdiri dari badan intelijen pusat, departemen kriptologi, dan departemen intelijen sinyal. National Security Service Säkerhetspolisen atau biasa disingkat SÄPO merupakan Dinas intelijen utama pemerintah Swedia. SÄPO membawahi beberapa cabang operasional seperti intelijen sinyal, kontra intelijen, dan kepolisian nasional. Badan ini mengawasi serta melakukan pengawasan asing dan domestik serta menganalisis data intelijen. Kepolisian nasional adalah unit aksi utama dari SÄPO, unit ini memiliki divisi operasional yang penting termasuk ONI yang merupakan unit kontraterorisme kepolisian nasional Swedia. Unit tersebut juga memiliki kekuatan operasional dan aksi militer khusus untuk melakukan pencarian dan penangkapan teroris yang berada di Swedia dan diseluruh wilayah Eropa melalui bantuan badan intelijen asing (Säkerhetspolisen, 2015).

Tugas SÄPO juga bergerak pada bidang Kontra Terorisme. Badan keamanan ini memiliki tanggung jawab utama untuk melawan terorisme di Swedia. SÄPO berfokus pada pekerjaan intelijen dan mencegah awal kejahatan teroris. Landasan tugas SÄPO diawali dengan pengumpulan intelijen dan pembangunan pengetahuan. Upaya dari kontra terorisme sendiri harus melibatkan lembaga pemerintahan serta keberhasilan dari upaya strategi kontra terorisme juga bergantung pada kerjasama dengan pihak nasional maupun internasional (Sakerhetspolisen, 2022).

Sebagai pengingat awal di Swedia ketika perang melawan terorisme yang terjadi pada desember 2001 ini telah menyebabkan banyak korban, termasuk dua orang

pencari suaka yang diekstradisi ke Mesir melalui bantuan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat. Karena telah mendeportasi orang-orang yang memiliki resiko akan disiksa karena melanggar hukum internasional, pihak berwenang Swedia dikritik atas operasi tersebut oleh badan-badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Sehingga daripada berfokus pada bagaimana melindungi hak asasi manusia, sejak akhir 2001, Swedia telah memperluas cakupan undang-undang anti-terorismenya. Pada tahun 2010, Swedia mulai mengkriminalkan pengadaan publik, perekrutan, dan pelatihan untuk terorisme. Pada tahun 2016, Swedia mulai memperluas undang-undang anti-terorismenya dengan memasukkan larangan untuk berpergian ke luar negeri dengan maksud berpartisipasi dalam kegiatan terorisme. Reformasi hukum yang dilakukan Swedia tentu disertai dengan penurunan ambang batas penggunaan tindakan pemaksaan terhadap tersangka. Selanjutnya, pada tahun 2019 pihak berwenang dengan semangat barunya mulai menerapkan undang-undang kontrol untuk orang asing khusus yang sudah ada sebelumnya yang merupakan non-warga untuk segera dideportasi dari Swedia (Strandh & Eklund, 2015).

Hal yang telah membuat situasi di Swedia menjadi semakin menarik berasal dari pengaruh perspektif global. Sebelumnya, Swedia relatif tidak terpengaruh dari serangan teroris yang dilakukan dengan kedok jihadisme kekerasan, namun hal ini bermula ketika ada serangan paling mematikan yang terjadi pada tahun 2017, yang mana kejadian tersebut menyebabkan lima korban yang kehilangan nyawa. Pelaku yang melakukan serangan tersebut telah mengatasnamakan ISIS sebagai alasan dibalik serangan yang dilakukan, mereka mewujudkan hal tersebut dengan membajak sebuah truk dan menabrak pejalan kaki di jalan perbelanjaan di pusat Kota Stockholm. Namun jika di kilas balik, insiden paling mematikan juga terjadi pada 7 tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2010. Serangan yang dilakukan ini juga terjadi di area tengah ibu Kota. Untungnya, pelaku bom bunuh diri hanya membunuh dirinya sendiri. Meskipun jenis serangan ini jarang terjadi, namun sangat penting untuk melakukan normalisasi intervensi negara yang represif dalam bidang keamanan (Strandh & Eklund, 2015).

Aktor sentral yang membantu mencegah terorisme dalam hal membantu mewujudkan kebijakan anti-terorisme adalah SÄPO (Strandh & Eklund, 2015). Selain metode pengumpulan intelijen tradisional, SÄPO juga melakukan yang disebut dengan istilah "Pembicara sukarela" (Frivilliga Samtal). Dalam melakukan hal tersebut tentu SÄPO melibatkan anak muda yang bukan tersangka kejahatan, namun memiliki track record pernah melakukan radikalisasi atau anak muda yang telah terjangkit radikal atau mereka yang merupakan individu yang memiliki akses dalam informasi yang ingin di verifikasi atau dibubarkan oleh SÄPO (Strandh & Eklund, 2015).

*c. De-radikalisasi Swedia melalui Program National Strategy Against Violent Extremism (NSAVE)*

Pasca terjadinya serangan terorisme 9/11 di World Trade Center, serangan terorisme mulai bermunculan dan radikalisme telah menjadi fenomena baru dikalangan masyarakat barat salah satunya juga di Swedia. Menanggapi masalah tersebut, Swedia memutuskan untuk mendirikan NSAVE pada tahun 2014. NSAVE merupakan kepanjangan dari *National Strategy Against Violent Extremism* yang resmi dirilis pada tahun 2016. Strategi tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam upaya pencegahan terhadap radikalisme yang terjadi pada masyarakat tingkat lokal (Olsson & Nilsson, 2018).

Strategi NSAVE menjelaskan bahwa tindakan radikal tidak hanya berkuat pada penyerangan melalui aksi namun juga pada tingkatan ideologi. Sehingga diperlukan pencegahan ketat untuk melawan radikalisasi ini. Strategi baru yang dilakukan NSAVE berfokus pada pengembangan demokrasi melalui pendidikan dan pengetahuan untuk mengurangi ketertarikan terhadap lingkungan ekstrim. NSAVE mengidentifikasi radikalisme sebagai proses dimana suatu individu atau kelompok yang mengembangkan pemikiran ekstrimis dan bersedia untuk melakukan kekerasan untuk mewujudkan pemikiran ekstrim tersebut seperti yang dilakukan teroris (Norlander, 2016).

NSAVE telah membagi tugas menjadi dua tingkatan yakni tingkatan lokal maupun nasional. Pada tingkatan lokal berfokus pada penciptaan hubungan yang kuat antara pemerintah Kota, lembaga, polisi dan masyarakat sipil untuk membangun sebuah kepercayaan dan keamanan sehingga dapat meningkatkan pertukaran informasi. Dalam menciptakan iklim terbuka, strategi ini merekomendasikan pemerintah Kota untuk membentuk konsil sipil dimana pemerintah kota bersama dengan berbagai institusi dapat melakukan dialog mengenai permasalahan radikalisme (Affairs, 2019). Tujuan dari tingkatan ini adalah untuk menciptakan kolaborasi antar Kota sehingga setiap Kota dapat melakukan strategi dan kebijakan bersama.

Pada tingkatan nasional, NSAVE yang memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan dukungan terhadap lembaga, kotamadya, dan organisasi masyarakat sipil. NSAVE adalah bagian dari jaringan ahli di tingkat internasional dan memiliki tanggung jawab dalam memperbarui penelitian mengenai radikalisme dan ekstrimisme kekerasan untuk memberikan pengetahuan pada tingkat regional maupun lokal. Pada tingkat nasional, NSAVE juga menangani permasalahan internet dan media sosial yang telah menjadi salah satu penyebab radikalisme meluas. NSAVE melakukan strategi dalam mengurangi perekrutan dari internet dan memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana cara untuk terhindar dari radikalisme yang dilakukan dalam internet (Norlander, 2016).

Pada penelitiannya, Olsson & Nilsson (2018) menjelaskan bahwa ada tiga dimensi tujuan dari Strategi nasional. Dimensi pertama adalah pembinaan demokrasi, tujuan dari dimensi ini untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi terhadap masyarakat serta memahami hak dan tanggung jawab demokrasi. Strategi ini berfokus pada pentingnya sistem sekolah, karena sekolah telah diidentifikasi sebagai salah satu tempat dimana semua pemuda-pemudi melakukan perkumpulan dan tempat yang bebas untuk mengutarakan pendapat. Strategi ini juga berfokus pada pentingnya kolaborasi antar sekolah, pemerintah Kota dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara, sehingga terhindar

dari radikalisasi. Dimensi kedua adalah pencegahan, dimensi ini berfokus pada pekerjaan pencegahan aktif seperti intervensi bagi suatu kelompok atau individu yang berada di dalam lingkungan yang berisiko radikal. Tujuan utama dari dimensi ini adalah untuk mendidik pekerja seperti guru dan pekerja sosial lainnya. Dimensi ini diarahkan pada departemen pelayanan sosial di Kotamadya untuk memberikan dukungan dan pencegahan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dimensi ketiga adalah pelarangan, dimensi ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan terhadap individu yang berada di lingkungan yang sangat keras atau berada dalam lingkungan teroris. Pekerjaan utama dalam dimensi ini ditujukan pada pemerintah Kota dan kepolisian untuk memberikan bantuan bagi individu yang ingin keluar dari lingkungan teroris. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan dukungan terhadap keluarga ekstrimis yang ditinggalkan. Ketiga dimensi tersebut telah diterapkan oleh pemerintahan Swedia dalam melakukan pencegahan radikalisasi pada tingkat regional maupun nasional (Olsson & Nilsson, 2018)

d. *Memperkuat Lembaga Terorisme dengan National Center for Terrorist Threat Assessment (NCT)*

Swedia telah memperkuat lembaga-lembaga terorismenya melalui NCT dengan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa lembaga resmi untuk memerangi teroris. *National Center for Terrorist Threat Assessment (NCT)* merupakan sebuah kelompok kerja gabungan yang dikelola oleh personel dari Badan Radio Pertahanan Nasional (FRA), Badan Intelijen dan Keamanan Militer (MUST), serta Badan Keamanan Swedia SÄPO. Tugas dari NCT sendiri adalah membuat analisis strategis atas insiden, peristiwa, tren, dan kecenderungan yang ada pada terorisme. NCT juga melakukan penilaian terhadap dampak dari suatu ancaman teroris serta kepentingan Swedia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Badan Radio Pertahanan Nasional dapat memproses data pribadi hanya jika relevan dengan masalah intelijen pertahanan tertentu. Pembentukan Radio Pertahanan Nasional tidak memproses data



pribadi tentang ekstremisme kekerasan yang tidak terkait dengan keadaan asing (NCT, 2021).

Dalam penelitiannya, Rostami et al. (2020) menjelaskan bahwa pejuang asing yang bergabung dengan ISIS di era modern ini telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi upaya dunia global dalam melawan terorisme. Meskipun pejuang asing yang bergabung dengan organisasi teroris ini bukan merupakan fenomena baru, namun seiring bertambahnya waktu akan terus meningkat didukung dengan pemberontakan di Suriah pada tahun 2011 (Rostami et al., 2020). Eropa merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap ancaman terorisme. Menurut PBB, lebih dari 40.000 “pejuang teroris asing” dari lebih 110 negara anggota telah bergabung dengan organisasi teroris seperti Negara Islam (IS) dan Al Qaeda di Irak dan Suriah. Sekitar 14.910 dari 40.000 pejuang asing telah berangkat ke Suriah dan Irak. Europol juga memperkirakan bahwa setidaknya ada 7.800 orang Eropa dari dua puluh empat negara telah melakukan perjalanan ke daerah konflik di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS (UNMCPR, 2017).

Untuk menanggapi masalah tersebut *National Center for Terrorist Threat Assessment* (NCT) telah mengambil peran dalam melakukan analisis terhadap kejadian tersebut, bahwasannya Swedia juga termasuk dalam daftar salah satu negara di wilayah Eropa yang mengalami tren tersebut. Menurut Center for Counter-Terrorism (ICCT) Swedia merupakan salah satu negara dengan jumlah pejuang asing paling terbanyak kedua setelah Belgia dan Austria (Dawson, 2021). Sebelumnya, Swedia telah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang melarikan diri dari konflik, namun sekarang banyak anak muda yang keluarganya berlindung disana yang justru berseberangan dengan Swedia. Sekitar 300 orang warga Swedia yang telah melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS (BBC, 2016). Pusat Penilaian Ancaman Teroris Nasional (NCT) menyatakan bahwa ancaman utama teroris terhadap kepentingan Swedia terutama berasal dari Islamisme yang mempromosikan kekerasan dan individu yang terinspirasi oleh ISIS.

Tidak hanya menjadi pengeksport ISIS terbesar, Swedia juga mengalami banyak insiden teroris salah satunya adalah pengebom bunuh diri yang dilakukan oleh Mujahid Taymour Abdel Wahab dilandaskan oleh kebenciannya terhadap dukungan Swedia pada Amerika Serikat di perang Afghanistan dan juga pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW di koran Swedia pada tahun 2007. Bom bunuh diri ini dilakukan tepatnya pada pusat perbelanjaan Stockholm, Swedia. Tidak hanya itu, Swedia juga dikejutkan dengan ledakan kedua yang meledak sekitar 10 menit setelah bom pertama yang diledakan di dalam mobil yang terletak di parkir pinggir jalan. Setelah kejadian tersebut, aksi-aksi teror mulai bermunculan sehingga menyebabkan stabilitas keamanan Swedia menjadi terganggu (Republika, 2020).

Menanggapi hal tersebut, Dinas keamanan Swedia telah membuat keputusan mengenai tingkat ancaman teroris di Swedia. NCT memberikan masukan terhadap keputusan tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan secara terus menerus terhadap tingkat ancaman teroris di Swedia. NCT dapat menilai bahwa kemungkinan adanya aktor yang memiliki niat dan kemampuan untuk melakukan serangan teroris terhadap Swedia. Adapun lima poin yang digunakan Swedia untuk mengukur tingkat ancaman sebagai berikut ; (1) Tidak ada ancaman, (2) Ancaman rendah, (3) Ancaman sedang, (4) Ancaman tinggi, (5) Ancaman sangat tinggi. Penilaian yang dilakukan NCT ini terbatas dalam waktu dan hanya berlaku selama satu tahun. Sehingga NCT juga melakukan evaluasi terhadap tingkat ancaman teroris secara terus menerus dan disesuaikan setiap tahunnya (Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) & Swedish Police, 2020).

*e. Melakukan Kerjasama Internasional dan Regional*

Dalam melakukan Kerjasama Internasional dan Regional dapat terlihat dari bergabungnya Swedia pada UE yang mana Swedia merupakan salah satu anggota Uni Eropa yang mendukung upaya CT dalam organisasi regional dan multilateral termasuk juga jaringan kesadaran Radikalisasi Komisi Eropa EU-9 yang berfokus pada FTF, Group Kontra Terorisme (30 negara eropa), Kelompok kerja polisi untuk Terorisme, dan EUROPOL (state.gov, 2021)

Swedia telah mendanai proyek pengembangan kapasitas CT internasional melalui bantuan pembangunan dari badan kerjasama pembangunan Internasional Swedia (SIDA). Swedia juga melakukan pendanaan untuk kantor PBB yang bernaung dari cabang pencegahan Narkoba dan Kejahatan terorisme dan bahkan Swedia juga melakukan pendanaan terhadap OSCE yang merupakan organisasi regional di wilayah Eropa. Swedia memberikan angkatan bersenjata kepada 220 tentara ke misi stabilisasi terpadu multidimensi PBB di Mali dan memperpanjang misi hingga 2021. Swedia juga telah bergabung dalam misi dukungan tegas di Afganistan dan telah menyediakan hingga 50 anggota layanan (state.gov, 2021).

Partisipasi yang dilakukan Swedia dalam membantu kerjasama di ruang lingkup Internasional cukup terbilang aktif. Sebagai salah satu anggota Defeat-ISIS Coalition, Swedia telah memberikan banyak kontribusi kemanusiaan kepada populasi yang terkena dampak ISIS di Irak, Swedia juga telah memperpanjang penempatan hingga 70 instruktur militer di Irak untuk mendukung upaya Defeat-ISIS hingga pada tahun 2021. Swedia juga telah menyumbangkan dukungan kemanusiaan ke suriah sebesar \$54 Juta pada tahun 2020. Sejak tahun 2016, Swedia juga telah menerapkan strategi krisis regional untuk suriah (\$190 juta) yang mencakup dukungan ketahanan bagi kelompok-kelompok yang terkena dampak ISIS (Sweden, 2020).

Swedia juga merupakan salah satu anggota dari *The Financial Action Task Force* atau biasa disingkat sebagai FTAF. Organisasi ini termasuk dalam *inter-governmental organization* yang dibangun pada tahun 1989 dengan memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang dan kemudian dikembangkan untuk memberantas kegiatan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi atau pengembangan senjata pemusnah massal. Dalam operasionalisasinya FTAF melakukan monitoring implementasi rekomendasi yang dikeluarkan kepada anggotanya, melakukan review teknik dan media pemberantasannya serta mendorong implementasi rekomendasinya secara global (FTAF, 2020).

Swedia sendiri telah menjadi salah satu anggota FTAF sejak tahun 1990. Secara umum, Swedia telah dianggap sebagai negara yang memiliki kejahatan paling rendah. Namun meskipun begitu, Swedia telah menghadapi risiko pencucian uang. Hal tersebut terjadi karena peran Swedia sebagai pusat keuangan regional dan juga akibat dari kejahatan domestic yang terjadi khususnya kejahatan pajak. Hal ini juga selaras dengan resiko yang dihadapi Swedia dalam memerangi pendanaan teroris. Otoritas Swedia adalah untuk mengutamakan pemberantasan pendanaan teroris dan mengintegrasikan hal tersebut dengan Strategi Kontra Terorisme lainnya. Meski demikian, adapun kelemahan hukum dan praktis dalam penerapan sanksi keuangan yang ditargetkan Swedia untuk membekukan aset dari teroris yang harus segera teratasi.

Pada tahun 2017, FTAF telah melakukan penilaian terhadap sistem pencucian uang dan pembiayaan kontra teroris Swedia (AML/CFT) berdasarkan rekomendasi dari FTAF 2012. Penilaian yang dilakukan FTAF ini bertujuan untuk meninjau tingkat keefektifan dari Rezim APU/PPT Swedia dan juga tingkat kepatuhan teknisnya terhadap Rekomendasi FTAF itu sendiri. Sejak penilaian tindakan Swedia di tahun 2017 untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan teroris serta laporan tindak lanjut mereka pada tahun 2018, Swedia telah mengambil sejumlah tindakan untuk memperkuat kinerja pekerjaannya. Dan pada akhirnya Swedia dinilai telah patuh pada 14 rekomendasi dan sebagian besar juga telah patuh dalam 23 rekomendasi (GAFI/FATF, 2017). Sehingga melalui FTAF ini, Swedia sudah terlihat baik dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu menangani pendanaan terorisme yang merupakan salah satu strategi yang dilakukan Swedia dalam menerapkan strategi Kontra Terorisme.

Sehingga dapat diketahui bahwa terorisme merupakan salah satu dari beberapa ancaman yang berkaitan dengan kesejahteraan kehidupan manusia dan keamanan nasional. Hal tersebut tentu akan menjadi tanggung jawab sebuah Negara dalam menyelesaikan dan mencegah ancaman yang ada. Melalui Dinas Keamanan negaranya, Swedia memiliki tanggung jawab penuh untuk melawan dan mengejar serangan teroris untuk melindungi

kepentingan negaranya. Kejahatan teroris sendiri dapat dideteksi, diselediki dan dituntut melalui kemampuan dari gabungan sistem peradilan dan badan Intelijen Swedia. Namun, untuk memiliki keamanan secara penuh akan berdampak pada pembatasan yang tidak dapat diterima oleh hak-hak dan kebebasan (Sweden, 2011).

Untuk menghadapi serangan teroris yang berskala besar, Swedia bersama dengan lembaga pemerintah serta aktor lainnya akan bertanggung jawab atas persiapan, seperti perlindungan fungsi-fungsi yang penting bagi operasi masyarakat dan manajemen konsekuensi yang efektif. Dalam melakukan pencegahan, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan pelaku teroris atau ekstremisme kekerasan untuk mengatur agenda dan memastikan bahwa debat publik harus dilakukan secara demokrasi. Tidak hanya melindungi negaranya, Swedia juga memiliki tanggung jawab untuk membantu neegara lain, hal ini didasarkan oleh komitmen kerjasama internasional yang mana diharapkan dapat membantu menjaga kepentingan Swedia baik di dalam maupun di luar negeri (Sweden, 2011). Hal tersebut telah menjelaskan bagaimana strategi dari Kontra Terorisme Swedia telah dilakukan dengan melalui banyak pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan serangan teroris. Namun, strategi Kontra Terorisme ini dapat berubah-ubah seiring dengan waktu yang berjalan dan perkembangan masalah teroris yang dihadapi oleh suatu Negara. Sama dengan negara lain yang juga menghadapi masalah terorime, Swedia akan terurs memantau situasi keamanan dan terlibat aktif dalam kerjasama internasional untuk menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang efektif.

## **Kesimpulan**

Meskipun serangan bom yang terjadi di World Trade Center pada tahun 2001 silam telah mengejutkan semua media di seluruh dunia termasuk media di Swedia, namun hal tersebut dianggap bukan masalah besar bagi politisi di Swedia, mengingat Swedia tidak ikut campur dalam serangan pimpinan AS di Irak. Tetapi, seiring berjalannya waktu posisi ini mulai berangsur-angsur berubah, hal tersebut ditandai dengan bergabungnya Swedia dengan pasukan internasional intervensi militer di Swedia. Hal ini juga selaras dengan gabungannya warga Swedia yang ikut perang dengan ISIS. Hal tersebut juga diikuti dengan serangan bom yang melanda beberapa Kota di Swedia. Selain itu banyak masyarakat Swedia yang telah

tercemar dengan pengaruh ideologi radikal oleh ISIS, setidaknya ada 300 orang lebih yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Langkah yang diambil oleh Swedia terkait kebijakan kontraterorisemenya cukup menjadi perhatian di beberapa negara di Eropa, bahkan UE sendiri masih meragukan jalannya strategi kontra terorisme Swedia. Swedia banyak dikritisi mengenai strategi kontraterorisemenya karena mereka menganggap bahwa Swedia kurang tegas dalam memerangi Terorisme di Swedia.

Berdasarkan analisis menggunakan konsep dari Kontra Terorisme bahwasannya untuk melakukan pencegahan terhadap terorisme, suatu pemerintahan negara akan mengupayakan seluruh kebijakan baik domestik maupun kebijakan luar negeri dalam mencecegah teroris. Swedia telah menerapkan lima langkah dalam mengupayakan Kontra Terorisme itu sendiri. Seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan, lima upaya ini terdiri dari penegakkan hukum melalui CVE, penggunaan badan intelijen SÄPO, Deradikalisasi Swedia melalui NSAVE, memperkuat lembaga terorisme dengan NCT, melakukan kerjasama di tingkat regional maupun internasional. Kelima upaya tersebut telah dilakukan Swedia untuk mengurangi adanya tindakan terorisme atau radikalisme. Melalui *Country Report on Terrorism 2021 United States department of State*, hingga saat ini belum ada lagi aksi langsung dari terorisme yang terjadi di Swedia. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal data serta sedikitnya yang mengkaji tentang strategi Kontraterorisme di Swedia. Penelitian selanjutnya akan membahas terkait strategi Kontra Terorisme di negara-negara wilayah Nordik yang juga memiliki kekhawatiran yang sama terkait kebijakan negara di wilayah tersebut dalam menerapkan strategi Kontra Terorisme.

## Referensi

- Affairs, H. (2019). *of the project- collaborations on prevention of radicalisation LED IN 2019*.
- Agerberg, M., & Sohlberg, J. (2021). Personal Proximity and Reactions to Terrorism. In *Comparative Political Studies* (Vol. 54). <https://doi.org/10.1177/0010414021997162>
- Backlund, A. (2011). *The Sweden Democrats in Political Space manifesto content analysis*.
- BBC. (2016). Mengapa Swedia menjadi eksportir jihadis terbesar di Eropa\_ - BBC News Indonesia. Retrieved from [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161007\\_dunia\\_swedia\\_jihadis](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161007_dunia_swedia_jihadis)
- BBC. (2018). Stockholm truck attack\_ Who is Rakhmat Akilov\_ - BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-europe-39552691>
- Brå. (2023). *About Brå - Brottsförebyggande rådet*. Retrieved from <https://bra.se/om-bra.html>
- Charles Westin. (2006). Article\_ Sweden\_ Restrictive Immigration Policy an. Retrieved from <https://www.migrationpolicy.org/article/sweden-restrictive-immigration-policy-and-multiculturalism>
- Convention, E., Rights, H., Court, E., Rights, H., Kingdom, U., Kingdom, U., & Kingdom, U. (2016). *Terrorism and the European Convention on Human Rights*. 2009(3455), 1–21.
- Cook, J., & Vale, G. (2018). From Daesh to “Diaspora”: Tracing the Women and Minors of Islamic State. *Icsr*, 74. Retrieved from <https://icsr.info/2018/07/23/from-daesh-to-diaspora-tracing-the-women-and-minors-of-islamic-state/>
- CVE. (2022). In English \_ CVE. Retrieved from <https://cve.se/omcve/inenglish.4.44140c6e18408651f69bb1.html>
- Dawson, L. L. (2021). A comparative analysis of the data on Western foreign fighters in Syria and Iraq : Who went and why? *ICCT Research Paper*, 2–56. Retrieved from <https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-why/>
- Eurojust. (2020). *Increase in cumulative charges for terrorism and war crimes*. (May). <https://doi.org/10.2812/340844>
- Finch, J., Jönsson, J. H., Kamali, M., & McKendrick, D. (2022). Social work and countering violent extremism in Sweden and the UK. *European Journal of Social Work*, 25(1), 119–130. <https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1657803>
- FTAF. (2020). Sweden.
- GAFI/FATF. (2017). *Sweden Mutual Evaluation Report*. (April). Retrieved from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Sweden-2017.pdf>
- Gustafsson, L., & Ranstorp, M. (2017). Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq. An analysis of open-source Intelligence and statistical data. In *CATS Center for Assymetric*

*Threat Studies.*

- J., Jönsson, J. Kamali, M. and McKendrick, D. (n.d.). *Social Work and Countering Violent Extremism in Sweden and the UK European Journal of Social Work Finch, J.\**, Jönsson, J. Kamali, M. and McKendrick, D. 44(0).
- Meridian. (2014). *Countering Violent Extremism in Sweden* \_ Meridian International Center. Retrieved from <https://www.meridian.org/project/countering-violent-extremism-in-sweden/>
- NCT. (2021). *One-year assessment for 2021 – summary The terrorist threat to Sweden in 2021*. 1(4), 2–5.
- Norell, M. (2005). *Swedish National Counter Terrorism Policy after “Nine-Eleven”*: *Problems and Challenges*. (April), 37. Retrieved from <http://www.zotero.org/hipersons/items/collection/ZSZTXUNB>
- Norlander, D. (2016). *Nationell strategi mot våldsbejakande extremism*. Retrieved from <http://media.samordnarenmotextremism.se/2016/06/NSMVE-Strategi.pdf>
- Olsson, E., & Nilsson, M. (2018). *Swedish Municipalities and Their Strategies Against Radicalization A case study of two municipalities in Kronobergs County and their implementation of the National Strategy Against Violent Extremism*.
- Omelicheva, M. Y. (2013). *Terrorism in Central Asia. Education about Asia*, 18(3), 1–6.
- Radio Sweden. (2017). *Sweden home to 2,000 Islamist extremists - Radio Sweden* \_ Sveriges Radio. Retrieved from <https://sverigesradio.se/artikel/6731567>
- Ranstorp. (2019). *Mari belajar dari Denmark - Axxess*. Retrieved from <https://www.axess.se/artiklar/lat-oss-lara-av-danmark/>
- Ravndal, J. A. (2018). *Right-wing terrorism and militancy in the Nordic countries: A comparative case study. Terrorism and Political Violence*, 30(5), 772–792. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1445888>
- Republika. (2020). *Stockholm Diguncang Dua Ledakan Bom* \_ Republika Online Mobile. Retrieved from <https://internasional.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/12/13/151882-stockholm-diguncang-dua-ledakan-bom?>
- Reuters. (2016). *Sweden convicts man of preparing suicide bomb attack* \_ Reuters. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-sweden-security-idUSKCN0YO0X2>
- Rostami, A., Sturup, J., Mondani, H., Thevselius, P., Sarnecki, J., & Edling, C. (2020). *The Swedish Mujahideen: An Exploratory Study of 41 Swedish Foreign Fighters Deceased in Iraq and Syria. Studies in Conflict and Terrorism*, 43(5), 382–395. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1463615>
- sakerhetspolisen. (2022). *Organisation - Säkerhetspolisen*. Retrieved from <https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska/about-the-security-service/organisation.html>
- Säkerhetspolisen. (2015). *History - Säkerhetspolisen*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20150329013009/http://www.sakerhetspolisen.se:80/en/s>



- wedish-security-service/about-us/history.html
- Sandler, T. (2005). Collective versus unilateral responses to terrorism. *Public Choice*, 124(1–2), 75–93. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-4747-y>
- Schclarek Mulinari, L. (2019). The Spectrum of Repression: Swedish Muslims' Experiences of Anti-terrorism Measures. *Critical Criminology*, 27(3), 451–466. <https://doi.org/10.1007/s10612-019-09462-8>
- state.gov. (2021). United States Department of State. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1984.tb02193.x>
- Strandh, V., & Eklund, N. (2015). Swedish counterterrorism policy: An intersection between prevention and mitigation? *Studies in Conflict and Terrorism*, 38(5), 359–379. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1009799>
- Sweden. (2020). United States Department of State. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1984.tb02193.x>
- Sweden, G. O. of. (2011). *Government Communication: Responsibility and commitment - a national counter-terrorism strategy*.
- Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), & Swedish Police. (2020). *Guideline on Protection of Public Spaces Protection against terrorism in crowded places*.
- UNMCPR. (2017). Greater Cooperation Needed to Tackle Danger Posed by Returning Foreign Fighters, Head of Counter-Terrorism Office Tells Security Council. SC/13097. *United Nations Meetings Coverage and Press Releases*. Retrieved from <https://press.un.org/en/2017/sc13097.doc.htm>
- VOA. (2010). Pelaku Bom Stockholm Menjadi Radikal saat Tinggal di Inggris. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/pelaku-bom-stockholm-menjadi-radikal-saat-tinggal-di-inggris-111817154/87232.html>